

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henry S. Siswosoediro. 2008. *Mengurus Surat-surat Kependudukan (identitas diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Jum Angraini, 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Prajudi Atmosudirdjo. 1986. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali PersSudikno
- Mertokusumo, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia : UI Press, 2007).
- Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini. 2003. *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggan, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonenesia, Ed 1, Cet 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

C. JURNAL

Daly Erni. 1999. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam hal Pembuatan Akta Kelahiran.*

Rodya Annisa Santi. 2016. *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yogyakarta Terhadap Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak. (skripsi) Universitas Gajah Mada.*

D. Internet

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/index.html>, diakses pada 24 Februari 2018.

https://dukcapil.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=152:berita12&catid=88&Itemid=2327, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

<https://minangkabaunews.com/artikel-13728-disdukcapil-padang-pariaman-luncurkan-program-alpa-beta-dan-ajek.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

<http://www.canangnews.com/2017/08/terus-berinovasi-disdukcapil-padang.html>.

Diakses pada tanggal 3 April 2018.

www.disdukcapil.padangpariamankab.go.id diakses pada tanggal 4 April 2018.

<http://inayasa.blogspot.com/2013/01/tertib-administrasi-kependudukan.html>, diakses pada 9 Oktober 2018.

